

Konsekuensi Ontologis dan Politis terhadap Konsep Subjek pada Filsafat Egoisme Max Stirner

Albi Abdullah Maulana Zein¹, Radea Yuli A. Hambali²

^{1,2} Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
albiabdullah8989@gmail.com, radeahambali@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to discuss the ontological and political consequences of the subject in Max Stirner's philosophy of egoism. This research is included in qualitative research, therefore the researcher only conducts a literature study. The results and discussion of this study are that egoism in Max Stirner's thinking is not egoism in the sense of acting for one's own benefit. Stirner's egoism is closer to the notions of self-mastery and self-regulation. Stirner's egoism also needs to be discussed in relation to the concept of the self. The I is this nothingness, so the 'I' is not bound by anything, it is unbound and subject to its own morality, rationality, thoughts, even desires. The I must control and master himself so as not to be subdued by those things. Through this concept of the I comes the egotistical subject. The conclusion of this study is that the understanding of Stirner's egoistic subject produces two consequences: ontological and political. Ontological consequences related to the rejection of universality and affirmation of singularity. The political consequence is that politics must be understood as an attempt to reject essentialist identities and generalities.

Keywords: Egoism; Property; Subject; The I

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas konsekuensi ontologis dan politis terhadap subjek pada filsafat egoisme Max Stirner. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, karenanya peneliti hanya melakukan studi pustaka. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu egoisme dalam pemikiran Max Stirner bukanlah egoisme dalam arti bertindak demi keuntungan sendiri. Egoisme Stirner lebih dekat dengan pengertian



penguasaan diri dan pengaturan diri. Egoisme Stirner juga perlu dibahas dalam kaitannya dengan konsep sang aku. Sang aku adalah ketiadaan ini, maka sang aku tak terikat oleh apapun, ia tidak terikat dan tertundukan oleh moralitas, rasionalitas, pikiran, bahkan hasratnya sendiri. Sang aku harus mengontrol dan menguasai dirinya sendiri supaya tidak ditundukan oleh hal-hal itu. Melalui konsep sang aku ini munculah sang subjek egois. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemahaman subjek egois Stirner menghasilkan dua konsekuensi: ontologis dan politis. Konsekuensi ontologis terkait penolakan atas universalitas dan pengafirmasian singularitas. Konsekuensi politisnya yaitu politik harus dipahami sebagai usaha untuk menolak identitas dan generalitas esensial.

Kata kunci: Egoisme; Properti; Sang aku; Subjek

Pendahuluan

Egoisme merupakan istilah yang tidak jarang salah dipahami. Egoisme umumnya seringkali dibagi menjadi dua, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis berpendapat bahwa kodrat manusia secara psikologis adalah memilih tindakan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Artinya, sikap altruisme dipandang sebagai sesuatu yang ilusi. Sebab motivasi sesungguhnya seseorang melakukan tindakan altruis adalah bentuk dari cinta diri. Sedangkan egoisme etis memiliki pandangan bahwa setiap orang wajib memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri (Sudarmita, 2016).

Egoisme etis memberikan semacam kriteria tentang mana perbuatan yang baik dan mana yang bukan. Menurut paham ini perbuatan yang baik adalah perbuatan yang menguntungkan bagi diri sendiri. Satu-satunya kewajiban manusia adalah mengupayakan supaya kepentingan dirinya sendiri dapat terjamin. Paham ini juga tidak menganjurkan agar mencari nikmat pribadi sepuasnya, seperti pendapat yang dimiliki oleh paham hedonisme. Egoisme etis lebih menganjurkan untuk mencari keuntungan yang bersifat jangka panjang (Sudarmita, 2016).

Namun, terdapat pengertian egoisme lain yang secara radikal berbeda dari dua pengertian egoisme sebelumnya. Pengertian egoisme ini dicetuskan oleh seorang filsuf bernama Max Stirner. Pertanyaan berikutnya yang perlu dibahas adalah apa itu ego. Ego merupakan sesuatu yang tidak ditundukan, tidak didefinisikan oleh apapun. Watak dari ego misalnya



tidak terletak pada sifat rasionalnya, sifat sosialnya, dan sifat-sifat esensialisnya. Individu tak pernah dapat dipahami, tak ternamai, tak terrengkuh segala konsep dan Roh. Ketika individu mulai mengalami keterjebakan pada kepemilikannya (misalnya kepemilikan atas fakultas rasio), ia dapat meninggalkannya atau menghancurkannya sebelum hal itu terkristalisasi menjadi suatu prinsip yang mengatur ego (Filsafat, 2017).

Individu yang egois dalam pengertian Stirner bukanlah suatu individu yang stabil dan statis, melainkan individu yang terus bergerak terus berubah mengafirmasi dan menegasi dirinya sendiri seturut kehendak hatinya sendiri. Dengan kata lain individu selalu menciptakan dirinya dengan mengubah, mengafirmasi dan menegasi dirinya sendiri. Dengan menekankan sifat ketidak-konsistenan dari individu, Stirner jelas menolak paham semacam humanisme yang mengakui kualitas-kualitas luhur yang inheren dalam diri manusia. Selain itu, Stirner juga menekankan aspek “ke-belum-an” dari ego itu sendiri, ego selalu belum, ego selalu tak mencapai kepenuhan. Maka bagi Stirner, hanya “*transitory ego*” inilah yang nyata. Stirner menyebut ego sebagai “yang unik” (*Der Einzige*) persis karena ego itu dapat mati, dapat berubah, dapat hancur, dan tak tergantung (Filsafat, 2017).

Egoisme Stirner memiliki kaitan erat dengan konsepnya tentang subjek atau individualitas. Keterkaitan erat antara egoisme dengan subjek ini menjadikan egoisme Stirner tidak sekedar perihal pemuasan kepentingan diri. Lebih jauh egoisme Stirner mencangkup aspek ontologis dan politis.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait tema ini, diantaranya ialah. Raja Cahaya Islam (2020), “Subjek Politik Egois Max Stirner” yang terbitkan oleh Jaqfi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi subjek politik. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Teori yang digunakan penelitian ini adalah filsafat egoisme Max Stirner. Hasil atau temuan penelitian ini hasil atau temuan dari penelitian ini adalah: subjek politik egois Max Stirner berangkat dari konsepnya tentang sang aku. Sang aku ini adalah ketiadaan. Lalu dari ketiadaan inilah muncul segala sesuatu. Segala sesuatu yang lahir dari sang aku ini disebut sebagai properti. Properti adalah apapun yang berkaitan dengan penambahan kuasa serta kesenangan sang aku. Lalu dari sang aku atau subjek politik egois inilah Stirner menegaskan konsepnya tentang memiliki diri sendiri (*Ownness*). Memiliki diri sendiri adalah wujud dari pembebasan diri yang tidak mengandaikan eksternalitas (Islam, 2020).

Saul Newman (2002), “Max Stirner and Politics of Posthumanism” yang diterbitkan oleh *Contemporary Political Theory*, Palgrave Macmillan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi politik post-humanisme.



Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi pustaka. Teori yang digunakan penelitian ini adalah kritik Stirner atas ide tetap dan humanisme Feuerbach. Hasil atau temuan penelitian ini adalah kritik Stirner atas identitas universal dan esensial telah menghasilkan 'patahan epistemologis' dengan humanisme pencerahan. Kritik tersebut berimplikasi pada wacana tentang politik perbedaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kritik yang dilakukan Stirner telah membuka kedok dominasi tidak langsung dari humanisme pencerahan dan membuka jalan untuk memikirkan politik post-humanisme (Newman, 2002).

Saul Newman (2003), "Stirner and Foucault: Toward a Post-Kantian Freedom" yang diterbitkan oleh *Postmodern Culture*, Johns Hopkins University Press. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kebebasan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, studi pustaka, dan komparasi. Teori yang digunakan penelitian ini adalah konsep kepemilikan diri Max Stirner dan kepedulian diri Michel Foucault. Hasil atau temuan penelitian ini adalah ide klasik kantian tentang kebebasan dianggap bermasalah menurut Stirner dan Foucault karena mengandaikan asumsi esensialis dan universalitas yang seringkali menindas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori kepemilikan diri Stirner dan kepedulian diri Foucault merupakan bentuk kebebasan non-esensialis. Mereka menunjukkan bahwa kebebasan tidak bisa lagi dibatasi oleh kemutlakan rasional dan kategori moral universal. Mereka mengambil pemahaman tentang kebebasan di luar batas-batas proyek kantian dan melandasinya dalam strategi kongkret serta kontingen dari diri (Newman, 2003b).

Beberapa penelitian terdahulu berfungsi untuk menyusun kerang berfikir dalam penelitian ini. Egoisme umumnya diapahami sebagai pendapat yang menyatakan bahwa kodrat manusia dalam kenyataannya cenderung memilih tindakan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. (Sudarmita, 2016). Egoisme Stirner berbeda sekaligus tidak sesederhana dengan pemahaman umum tersebut. Egoisme Stirner lebih dekat dengan pengertian 'penguasaan diri', 'pengaturan diri' yang oleh Stirner disebut 'ownership'/'kepemilikan diri' (Newman, 2011). Konsep kepemilikan diri Stirner tidak bisa dilepaskan dari konsep 'sang aku'. Sang aku adalah hasil dari penerapan prinsip dialektika pada dirinya sendiri. Jika prinsip dialektika diterapkan pada dirinya sendiri, maka ia akan mencapai limitnya atau negasinya sendiri. Akhirnya proses dialektika itu sendiri akan berhenti dan tidak memproduksi apa-apa kecuali ketiadaan (Blumenfeld, 2018). Dari ketiadaan ini maka sang aku tak terikat oleh apapun, ia tidak terikat dan tertundukan oleh moralitas, rasionalitas, pikiran, bahkan hasratnya



sendiri. Sang aku harus mengontrol dan menguasai dirinya sendiri supaya tidak ditundukan oleh hal-hal itu.

Konsepsi subjek pada pemikiran Stirner berkaitan erat dengan konsep lain tentang properti dan pemberontakan. Properti adalah sesuatu yang dikuasai sang aku dan berkaitan pada apa yang meningkatkan kuasa sang aku serta apa yang tak membuat sang aku tunduk (Stirner, 2000). Properti dapat berupa apapun semisal harta, kekuasaan, hasrat, kepercayaan, ideologi, filsafat dan lain-lain. Seorang penafsir Stirner bernama John Carroll menjelaskan bahwa ciri seseorang tidak menyadari properti adalah ketika orang tersebut tidak berangkat dari kesenangan diri. Orang itu justru berangkat dari sikap penyesuaian pada penilaian dari luar tentang apa yang baik dan yang tidak. Singkatnya, orang itu bertindak atas dasar ketundukan pada 'keharusan' (Carroll, 2010).

Properti itu dapat berubah menjadi ancaman dan memiliki potensi berhenti menjadi properti sejauh ia telah berubah menjadi ide beku atau *fixed ideas*. Ide beku ini mengancam dan membahayakan sang subjek egois ketika ide-ide tersebut menundukan dirinya, mendefinisikan dirinya, dan membatasi dirinya. Cara yang perlu ditempuh oleh sang subjek egois supaya lepas dari ide beku adalah dengan 'mengonsumsinya' dan menghancurkannya. Pada intinya subjek tidak boleh tunduk pada ide-ide beku tersebut. Penghancuran subjek atas properti memiliki kaitan langsung dengan konsep pemberontakan. Wujud dari pemberontakan ini diantaranya adalah usaha terus-menerus menola rezim penyeragaman. Ideologi, kepercayaan, tatanan ideal seringkali mengandaikan sebetulnya penyeragaman. Bentuk penyeragaman ini biasanya muncul dalam mekanisme pembentukan subjek-subjek. Segala esensi atau kategorisasi yang ditimbulkan oleh ideologi dan kepercayaan harus hancur di tangan sang pemberontak. Sang subjek politik egois ini adalah subjek yang senantiasa dalam kondisinya yang menjadi, dengan cara mengonsumsi dan menghancurkan properti yang menghantuinya. Ia berada dalam sebuah kondisi kontingensi radikal, dan dengan itulah segala bentuk identitas esensial termentahkan di hadapan sang subjek egois (Islam, 2020).

Penolakannya atas segala ide beku dan kondisinya yang dicirikan oleh kontingensi radikal dapat dirangkum dalam satu pernyataan, yaitu: afirmasi atau penegasan segala kemungkinan. Pernyataan itu dapat diurai konsekuensinya pada aspek ontologis dan politis. Pada aspek ontologis, penolakan Stirner atas ide-ide beku dan identitas esensial merupakan perwujudan dari penolakan atas universalitas dan keniscayaan. Pada aspek politik Stirner menolak segala bentuk kontrol yang mendorong pada pembentukan subjek seragam. Penolakan ontologisnya pada universalitas dan keniscayaan mengafirmasi persetujuan Stirner atas singularitas;



penolakannya pada politik mengafirmasi persetujuan Stirner atas usaha terus-menerus untuk menciptakan taktik dan menolak rezim penyeragaman (Guvenc, 2019).

Konsep subjek egois dalam pemikiran Stirner tidak bisa dilepaskan dari penjelasan tentang dialektika liberalisme. Dialektika liberalisme merupakan penjelasan Stirner tentang perjalanan sejarah pembebasan manusia yang dimulai dengan liberalisme politik, sosialisme liberal, dan humanisme liberal.

Liberalisme politik merupakan sebuah periode ketika manusia berhasil keluar dari konsep-konsep yang selama ini mengurungnya. Pada masa klasik manusia dikurung oleh konsep alam semesta sebagai pusat; pada masa pertengahan manusia dikurung oleh konsep Tuhan sebagai pusat. Masa liberalisme politik dicirikan dengan hukum yang rasional, birokrasi yang transparan, dan juga netralitas dari negara. Ciri-ciri tersebut berangkat dari andaian adanya otonomi dan hak dari subjek/individu. Pada masa ini setiap individu diberikan hak politik, kesetaraan, dan kebebasan mengekspresikan hak politiknya di ruang publik (Islam, 2020).

Stirner berpendapat bahwa liberalisme politik tidak lebih dari serangkaian teknik pendisiplinan, karena menggunakan mediasi antara individu dan norma-norma tertentu; membentuk subyek yang terdisiplinkan; subjek yang dibentuk secara tidak langsung dan tidak sadar. Kebebasan yang dimaksud dengan demikian menjadi kebebasan yg ilusif dan semu. Karena dalam hal kebebasan politik, individu berada dalam genggamannya negara, individu sudah ditentukan dan ditetapkan negara. Kehendak individu seolah-olah otonom, padahal kehendak itu selalu selalu berkuat perihal apa yang diinginkan oleh negara. Kebebasan yang diakui oleh karenanya sejauh kebebasan itu diakui juga oleh negara (Gosalnk, n.d.).

Sosialisme liberal tidak sependapat dengan asumsi liberalisme politik terutama asumsinya tentang hak dan otonomi individual. Sosialisme liberal berpendapat bahwa hak mesti diperluas ke ranah sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, asumsi sosialisme liberal terletak pada pengutamaan kepentingan komunal. Kepentingan komunal ini diperoleh dengan cara menghilangkan kepemilikan privat. Oleh karena itu setiap individu yang hidup dalam masyarakat komunal harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial atau masyarakat demi tercapainya distribusi ekonomi yang adil dan setara (Newman, 2005).

Posisi sosialisme liberal juga tidak lepas dari kritik Stirner. Kritik itu terletak pada penyerahan individualitas seseorang kepada komunalitasnya. Dalam artian, keunikan dan perbedaan-perbedaan setiap individu pada akhirnya mesti ditanggalkan. Masyarakat, sebagai bentuk



komunalitas masyarakat, merupakan wujud dari dominasi dan kedaulatan baru di hadapan individu yang dipaksa untuk tunduk.

Tahap terakhir dari liberalisme adalah humanisme liberal. Humanisme liberal memiliki ciri utama yaitu ditemukannya esensi manusia. Penemuan esensi manusia ini, berdampak pada penghilangan diferensialitas yang melekat pada manusia. Diferensialitas atau partikularitas mesti dilampaui demi kemanusiaan yang agung. Dan esensi manusia ini mesti menjadi sebuah acuan dan tujuan utama bagi setiap individu: ia mesti menyesuaikan diri padanya (Newman, 2005).

Tiga tahap sejarah tersebut bagi Stirner gagal membebaskan manusia supaya tidak tunduk pada sesuatu. Tiga tahap itu bagi Stirner merupakan contoh dari ide beku. Ide beku itu sendiri merupakan sebuah ide yang menundukan seorang manusia pada ide itu sendiri. Ide beku ini sendiri muncul sebagai suatu hal yang dipercayai tanpa keraguan, sebagai sebuah keagungan di mana tiap individu enggan untuk memberontak, melawan dan menentukan bagaimana individu seharusnya berpikir serta bertindak. Ide beku sering termanifestasi dengan menindas individu atau subjek.

Kritik Stirner yang diajukan kepada tiga perkembangan sejarah tersebut membuat Stirner merumuskan sendiri proyek pembebasan manusia. Proyek pembebasan Stirner ini dikenal dengan konsep egoisme. Egoisme Stirner memiliki premis dasar yaitu ketidakpercayaannya terhadap "hantu-hantu". Hantu yang dimaksud adalah sesuatu yang memposisikan individu di bawah kekuatan di luar dirinya, semisal: agama, moralitas, hukum, negara dan rasionalitas absolut. Penentangan Stirner atas kebenaran rasionalitas bukan berarti Stirner menolak kebenaran. Hal yang ditentang Stirner adalah caranya menjadi sakral, absolut, kebal kritik, transendental dan mensubordinasikan individu yang konsekuensinya menghapuskan kekuatan individu.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan, pertanyaan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini yaitu terdapat konsekuensi ontologis dan politis terhadap subjek pada filsafat egoisme Max Stirner. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana konsekuensi ontologis dan politis terhadap konsep subjek pada filsafat egoisme Max Stirner. Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsekuensi ontologis dan politis terhadap konsep subjek pada filsafat egoisme Max Stirner.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, karenanya peneliti hanya melakukan studi pustaka. Pertama-tama peneliti mengumpulkan sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sumber sekunder.



Sumber primer dari penelitian ini adalah karya Stirner berjudul *The Ego and Its Own* dan sumber sekunder dari penelitian ini adalah buku dan jurnal yang membahas pemikiran Stirner. Langkah selanjutnya dari penelitian ini adalah dengan melakukan deskripsi atas sumber-sumber primer maupun sekunder dari pemikiran Max Stirner. Penelitian ini menggunakan analisis atau pendekatan filsafat egoisme Max Stirner.

Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil dan pembahasan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Egoisme Max Stirner

Konsep sang aku merupakan konsep kunci dalam membahas egoisme Max Stirner. Sang aku bukanlah makhluk yang bernorma, bermoral, berkeadilan, bukan pula makhluk ekonomi, makhluk simbolik, makhluk yang bermain, dan lain semacamnya. Sang aku adalah ketiadaan. Stirner di sini menegaskan posisinya, yakni menolak segala determinasi konsep biologis, metafisik, materialis, dll. Stirner menolak kecenderungan esensialisme, karena bagi Stirner esensi adalah suatu hal yang asing bagi sang aku. Bahkan, keasingan inilah yang membuat sang aku dibatasi dan ditundukan.

Paragraf sebelumnya telah menyebut bahwa sang aku adalah ketiadaan. Filsafat Hegel terutama konsep dialektikanya merupakan titik tolak untuk menjelaskan ketiadaan dan sang aku. Dialektika merupakan konsep yang memandang segala sesuatu sebagai 'kesatuan dari apa yang berlawanan', sebuah proses maju melalui negasi atau penyangkalan'. Hegel menyebut pola penyangkalan dialektis ini sebagai *aufhaben* yang berarti: 'menyangkal atau membantalkan', menyimpan, dan mengangkat (Santoso 2015). Segala sesuatu bergerak menuju batasnya, selanjutnya batas itu sendiri terlampaui di dalam sebuah resolusi intrinsik. Resolusi lahir melalui gerak penyangkalan atau negasi tadi.

Apa konsekuensi yang timbul jika prinsip dialektika diterapkan pada dialektika itu sendiri? Jawabannya adalah dialektika akan sampai pada batasnya sendiri, konsekuensinya proses dialektika itu akan berhenti. Dengan kata lain, dialektika tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali ketiadaan dan ketiadaan lah yang tersisa. Dari titik inilah, konsep sang aku Stirner berangkat, yang tidak lain sang aku adalah ketiadaan itu sendiri. Sebagai sebuah ketiadaan, maka sang aku tak terikat dan tak terbatas oleh apapun. Sang aku justru melahirkan segala sesuatu, sang aku adalah ketiadaan yang kreatif, yaitu sesosok entitas yang menghasilkan segala sesuatu semisal norma, moralitas, rasionalitas, keadilan, dll (Blumenfeld, 2018).



Pembahasan tentang sang aku atau sang subjek egois tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Stirner tentang properti. Menurut Stirner properti merupakan sesuatu yang dikuasai sang aku. Properti juga dapat dipahami sebagai apa yang meningkatkan kuasa sang aku dan apa yang tak membuat sang aku tunduk. Seorang penafsir Stirner bernama John Carroll menggambarkan bahwa properti tidak menjadi properti ketika seseorang tidak berangkat dari kesenangan-diri, namun lebih condong pada sebuah sikap penyesuaian diri terhadap pendapat dari luar yang asing tentang apa yang baik dan berguna. Perilaku semacam ini tunduk pada sebuah “keharusan” (Carroll, 2010).

Properti juga tidak berkaitan tentang bagaimana seseorang memperoleh sesuatu. Properti lebih berkaitan tentang bagaimana seseorang memperlakukan sesuatu: bagaimana ia menikmati dan mendapatkan kesenangan, dan properti bukan hanya perihal bagaimana seseorang menghasilkan sesuatu, melainkan berkaitan dengan bagaimana seseorang menghancurkan sesuatu. Properti berhubungan erat dengan apapun yang menambah kuasa sang aku. Stirner menjelaskan bahwa penambahan atas kuasa sang aku ini bersifat tak terbatas. Artinya, apapun mampu meningkatkan kuasa, dan konsekuensinya segala sesuatu mampu menjadi properti (Stirner, 2000).

Properti itu di sisi lain dapat mengancam, dan akan berhenti menjadi properti sejauh ia mengandung kemungkinan untuk berubah menjadi ide-beku. Ide-beku ini merujuk pada sesuatu memungkinkan subjek egois untuk menundukan dirinya, mendefinisikan dirinya, dan juga membatasi dirinya, pada momen inilah properti menjadi berbahaya bagi sang egois. Properti dapat berbentuk apapun, semisal feminisme, komunisme, sosialisme, liberalisme, bahkan anarkisme sekalipun. Bagi Stirner, semua itu tak lebih dari properti. Mereka semua adalah hantu-hantu dan ide-ide beku yang sering menghantui subjek egois. Hantu-hantu yang sering menggoda agar sang subjek tunduk, mengorbankan diri, pasrah, dan juga meyakini tanpa pernah meragukannya (Islam, 2020).

2. Pemberontakan

Pemberontakan dalam pemikiran Stirner tidak ditujukan untuk mengubah sesuatu. Pemberontakan walaupun disebut bertujuan adalah untuk mengubah sang aku atau subjek egois. Apa alasannya? sebab ide-beku selalu menghantui dan mengitari subjek egois. Ide-beku itu bagi Stirner harus dihancurkan tanpa sisa, karena ia memiliki kemungkinan untuk menundukan si subjek egois. Bentuk kongkrit dari pemberontakan ini yaitu penolakan terhadap segala bentuk rezim penyeragaman. Bentuk penyeragaman ini biasanya muncul dalam mekanisme pembentukan



subjek-subjek di dalam sebuah tatanan. Negara merupakan salah satu contoh dari operasi penyubjekan ini (Islam, 2020).

Segala esensi yang muncul akibat ide-ide beku harus hancur di tangan sang pemberontak. Gagasan dan ide harus dianggap tidak lebih dari sekedar properti yang bisa dikonsumsi. Sang subjek egois ini adalah subjek yang senantiasa dalam kondisinya yang menjadi, dengan cara mengonsumsi dan menghancurkan properti yang menghantuinya. Ia berada dalam sebuah kondisi kontingensi radikal, dan dengan itulah segala bentuk identitas esensial tidak berdaya di hadapan subjek egois.

3. Memiliki Diri Sendiri (*Ownness*)

Konsep lain yang akan diuraikan dalam subjek egois adalah konsep memiliki diri sendiri (*Ownness*). Memiliki diri sendiri memberitahu seseorang untuk kembali kepada dirinya sendiri, atau sang aku. Memiliki diri sendiri mendorong sang aku supaya berangkat dari kesenangan bagi dirinya sendiri. Jika dikaitkan dengan kebebasan, memiliki diri sendiri selalu berada dalam keadaan bebas. Sebab sang aku sudah selalu menolak apa-apa yang berada di luar dirinya. Ia memprioritaskan dan menjunjung dirinya sendiri, ia menganggap tak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada dirinya (Stirner, 2000).

Seorang komentator Stirner bernama John F. Welsh menjelaskan bahwa kebebasan justru lahir dari memiliki diri sendiri. Dengan kata lain memiliki diri sendiri merupakan penyebab yang melahirkan kebebasan (Welsh, 2010). Bagi Stirner, jika seseorang tidak menjadi pemilik dirinya sendiri, ia takkan pernah bisa bebas sepenuhnya. Seseorang tidak menjadi pemilik dirinya sendiri ketika ia masih ditentukan dan dikendalikan oleh realitas eksternal, tatanan, atau kondisi objektif.

Konsep memiliki diri sendiri jauh lebih radikal dibanding dengan konsep kebebasan. Sebab kebebasan adalah suatu konsep mengawang, konsep ideal, atau sebuah harapan serta keluh kesah karena adanya pembatasan-pembatasan. Karena konsep kebebasan merupakan hal yang ideal dan abstrak, tidak menutup kemungkinan akhirnya konsep ini menjadi ide beku. Ide beku yang mengakibatkan subjek egois harus tunduk dan terbatas olehnya.

Memiliki diri sendiri berkaitan erat dengan sebuah proses atau usaha pembebasan diri. Pembebasan diri bertitik tolak pada egoisme dan memiliki diri sendiri. Tugas utama sang aku atau subjek egois adalah memiliki dirinya sendiri. Hal tersebut terwujud dengan cara menyatakan kedaulatan dan otonominya di hadapan konstruksi sosial dan kultural. Namun, perlu dipahami bahwa pembebasan diri tidak mendorong subjek untuk menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Sejauh mementingkan-diri sendiri adalah ide-beku yang tak terkendali oleh



sang aku, maka sikap tersebut pun harus dihindari oleh sang aku (Islam, 2020).

4. Konsekuensi Ontologis dan Politis

Egoisme Stirner menolak segala bentuk ide-ide beku, ide yang menundukan, membatasi subjek egois. Egoisme Stirner mengkritik dan menolak setiap gagasan yang condong pada universalitas, abstraksi, dan esensialis. Pada intinya gagasan tersebut mencoba meminimalkan bahkan menolak pluralitas individu dan menariknya pada satu esensi tunggal, abstrak, dan universal. Individu seolah digerakan oleh suatu 'keharusan' untuk mengikuti gagasan tersebut.

Pemahaman egoisme tersebut merupakan titik tolak untuk mengeksplorasi konsekuensi ontologis pada tulisan ini. Konsekuensi ini bisa ditemukan dalam kaitannya dengan konsep Stirner tentang 'Yang Unik'. Konsep ini berkaitan tentang ketidakmungkinan individu untuk dikategorisasikan dan diasbtraksikan ke dalam konsep apapun. Hanya individu lah yang riil dan memiliki pengalaman serta ide yang unik dan tak terbandingkan. Konsep yang unik juga berlaku antara satu individu dengan individu lain. Tidak bisa disangkal bahwa antara satu individu dengan dengan individu lain memiliki kesamaan. Namun kesamaan tersebut berlaku sejauh dilakukan perbandingan dan refleksi. Kendati individu A dan B memiliki kesamaan, tetap saja pikiran, gagasan, dan perasaan individu A adalah milik A bukan milik B (Koch, 1997).

Konsep 'yang unik' dan penolakannya atas ide-ide beku tercontoh dalam kritik Stirner atas liberalisme dan humanisme. Bagi Stirner, liberalisme tidak lebih dari serangkaian teknik pendisiplinan, karena menggunakan mediasi antara individu dan norma-norma tertentu; membentuk subyek yang terdisiplinkan; subjek yang dibentuk secara tidak langsung dan tidak sadar. Kebebasan yang dijunjung dalam liberalisme dengan demikian menjadi kebebasan yg ilusif dan semu. Karena dalam hal kebebasan politik, individu berada dalam genggamannya negara, individu sudah ditentukan dan ditetapkan negara. Kehendak individu seolah-olah otonom, padahal kehendak itu selalu selalu berkuat perihai apa yang diinginkan oleh negara. Kebebasan yang diakui oleh karenanya sejauh kebebasan itu diakui juga oleh negara (Gosalnk, n.d.).

Selain permasalahan itu, individualisme yang dianggap penting bagi liberalisme juga bermasalah menurut Stirner. Individualisme masih percaya pada peran negara, hukum, rasionalitas, dan prinsip moral universal sebagai basis dasar argumen mereka. Kepercayaan pada hal-hal tersebut bagi Stirner memiliki konsekuensi menempatkan individu di bawah hukum, rasionalitas, dan gagasan sejenisnya. Dengan kata lain



individu masih berada dalam rantai dan genggaman hantu-hantu atau ide-ide beku.

Kritik Stirner terhadap humanisme berkaitan dengan pemikiran Feuerbach tentang agama. Bagi Feuerbach agama merupakan penyebab alienasi manusia. Sebab, manusia memberikan segala kualitasnya seperti baik, adil, penyayang dll kepada entitas supranatural atau Tuhan. Selanjutnya entitas ini dianggap sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri atau independen, dan dipercayai serta dipuji oleh manusia. Usaha agar alienasi itu tidak terjadi adalah merebut kembali segala sifat-sifat manusia itu sendiri kepada dirinya. Perebutan kembali sifat-sifat tersebut dari Tuhan terjadi ketika seseorang menyadari bahwa ialah pencipta Tuhan. Konsekuensinya, Feuerbach menegaskan bahwa manusialah yang merupakan pusat, dan bukan Tuhan.

Stirner menyatakan bahwa apa yang ditemukan oleh Feuerbach - menjadikan manusia sebagai pusat- bukanlah manusia yang konkret dan individual. Manusia milik Feuerbach, adalah sosok manusia abstrak yang universal. Dalam istilah Stirner, manusianya Feuerbach ditulis dengan "M" besar yang artinya menjadikan Manusia sebagai *the divine*. Penemuan manusia ini tentu bagi Stirner tak berbeda dengan sosok Tuhan yang hendak ditolak oleh Feuerbach.

Bagi Stirner usaha Feuerbach adalah usaha yang sia-sia, karena ia mengulang posisi yang sama, yaitu mengulangi proses alienasi. Akibat dari penegasan atas esensi manusia yang dilakukan Feuerbach adalah eksklusivitas atas individu yang tak sesuai dengan esensi itu sendiri. Esensi ini memaksa setiap individu untuk tunduk pada kategori humanisme. Esensi di sini merupakan ideologi ilusif yang mencoba mensubordinasikan individu. Humanisme pada akhirnya menjadi sebuah hantu, atau dalam bahasa Stirner, ide-beku yang menggentayangi individu supaya tunduk kepadanya (Islam, 2020).

Konsekuensi ontologis yang bisa ditarik dari penolakan Stirner atas ide-ide beku melalui dua contoh di atas adalah penolakan atas universalitas dan pengafirmasian singularitas. Maksud dari pengafirmasian ini yaitu ketidakmungkinan individu/sang aku/ subjek egois untuk dikategorisasikan dan diabstraksikan dalam rumusan konsep universal. Singularitas hanya merujuk pada apa yang tak terkatkan, tak terpahami dan tak terpresentasikan (Guvenc, 2019). Hal itu menjadi mungkin sebab 'yang unik' memiliki segala kemungkinan untuk berubah. Kontingensi-diri ini adalah bentuk otonomi dari individu untuk lepas dari jerat abstraksi dan kategorisasi (Gosalnk, n.d.).

Tidak ada esensi pada inti kenyataan, yang ada hanyalah kekosongan. Menurut Stirner, esensi dunia yang sebenarnya justru adalah pengalaman



konkret sang aku, ia adalah 'esensi' yang secara pada saat bersamaan menyangkal esensi karena tidak mengacu pada generalitas abstrak di luar dirinya. Kekosongan di dasar atau inti kenyataan adalah ketiadaan kreatif, sebuah prinsip perbedaan yang melaluinya kontingensi diri, pluralitas, dan multisiplitas dapat dibentuk (Newman 2003).

Konsekuensi dalam hal politis berkaitan erat dengan konsep Stirner tentang pemberontakan. Politik seharusnya berkaitan dengan aktivitas melarikan diri dari identitas dan generalitas esensialis. Stirner berpendapat, perlawanan terhadap negara itu harus berbentuk pemberontakan bukan seperti revolusi. Pemberontakan dimulai dengan individu yang menolak identitas esensialnya, 'Saya' yang melaluinya, kekuasaan beroperasi: itu dimulai "dari ketidakpuasan manusia terhadap diri mereka sendiri". Selain itu, pemberontakan tidak bertujuan untuk menumbangkan institusi politik itu sendiri. Ia ditujukan pada individu yang menggulingkan identitas esensialnya sendiri—yang hasilnya adalah perubahan dalam tatanan politik. Gagasan pemberontakan ini melibatkan proses kemenjadian (becoming)—ini tentang terus-menerus menemukan kembali diri sendiri, daripada membatasi diri pada identitas represif esensialis.

Kesimpulan

Egoisme Max Stirner dapat dipahami sebagai 'penguasaan diri', 'pengaturan diri' yang oleh Stirner disebut '*ownness*'/'kepemilikan diri. Pembahasan egoisme perlu dikaitkan dengan konsep sang aku merupakan konsep kunci dalam membahas egoisme Max Stirner. Sang aku adalah ketiadaan, melalui ketiadaan ini Stirner menolak kecenderungan esensialisme. Konsekuensi dari pemahaman tersebut dapat dibagi menjadi ontologis dan entis. Konsekuensi ontologis terkait penolakan atas universalitas dan pengafirmasian singularitas. Konsekuensi politisnya yaitu politik harus dipahami sebagai usaha untuk menolak identitas dan generalitas esensialis. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi para pengkaji filsafat terkhusus aliran anarkisme. Keterbatasan penelitian ini yaitu tidak memberikan definisi tentang subjek secara jelas dan perdebatannya dalam sejarah filsafat. Berdasarkan keterbatasan tersebut penelitian selanjutnya diharapkan bisa lebih memberikan definisi subjek secara lebih jelas.



Daftar Pustaka

- Blumenfeld, J. (2018). *All Things are Nothing to Me The Unique Philosophy of Max Stirner*. Zero Books.
- Carroll, J. (2010). *Break-Out from The Crystal Palace The Anarcho-Psychological Critique: Stirner, Nietzsche, Dostoevsky*. Routledge.
- Filsafat, S. (2017). *Max Stirner: Prolegomena Menuju Nihilisme*. Southeast Asian Anarchist Library.
- Gosalnk. (n.d.). *Kebebasan dan Otonomi Individu Max Stirner*. Okupasiruang.
- Guvenc, D. A. W. (2019). *Max Stirner: Ontology , Ethics , Politics*. University of Ottawa.
- Islam, R. C. (2020). Subjek Politik Egois Max Stirner. *Jaafi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(2), 172–196.
- Koch, A. M. (1997). Max Stirner: The Last Hegelian or the First Poststructuralist? *Anarchist Studies*, 5, 95–107.
- Newman, S. (2002). Max Stirner and the Politics of Posthumanism. *Contemporary Political Theory*, 1(2), 221–238.
<https://doi.org/10.1057/palgrave.cpt.9300038>
- Newman, S. (2003a). Empiricism, Pluralism, and Politics in Deleuze and Stirner. *Idealistic Studies*, 33(1), 9–24.
- Newman, S. (2003b). Stirner and Foucault: Toward a Post-Kantian Freedom. *Postmodern Culture*, 13(2).
- Newman, S. (2005). *Power and Politics in Post-structuralist Thought*. Routledge.
- Newman, S. (2011). *Max Stirner*. Palgrave Macmillan.
- Santoso, L., & Dkk. (2015). *Epistemologi Kiri* (Revisi (ed.); p. 316). Ar-Ruzz Media.
- Stirner, M. (2000). *Ego and Its Own*. Cambridge University Press.
- Sudarmita, J. (2016). *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. PT Kanisius.
- Welsh, J. F. (2010). *Max Stirner's Dialectical Egoism A New Interpretation*. Lexington Books.